KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 FINAL/TIDAK FINAL

1721-B1

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK							
		H.1 NOMOR : 2 0 0 0 0 0 1 5 5 3 H.4 X Final				Final	
		H.2 X Pembetulan Ke- 0 H.3 Pembatalan			H.5 Tidak Final		
		11.2 Combetalari K	1.2 Temberulan Re-			n.s Huak Filial	
A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG							
A.1 NPWP : 68 807 587 8 722 000							
A.2 NIK :							
A.3 Nama : RETNO EKO SAYEKTI AS							
B. PPh PASAL 21 YANG DIPOTONG							
MASA PAJAK (mm-yyyy)	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER- NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG/DTP (Rp)	
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6	B.7	
4	21-402-01	7.000.00	7.000.000	0	15	1.050.000	
Keterangan Kode Objek Pajak : Honor dan Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS, Anggota							
B.8 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen 04392/LS-THR/RSJD.AHM/2022							
	Nama Doku						
B.9 PPh Pasal 21 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Pembebasan ini berdasarkan SKB.							
Nomor: Tanggal dd mm yyyy							
B.10 PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :							
3.11 PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan :							
C. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK							
C.1 NPWP Insta	ansi Pemerintah :	9 5 3 3 5	0 1 6 2 7 2 2	0 0 0			
C.2 Nama Instansi Pemerintah : RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR							
C.3 ID Subunit	Organisasi :						
C.4 Tanggal	:	2 6 dd 0 4 mm	2 0 2 2 <i>уууу</i>				
C.5 Nama Penandatangan : [RIANDY					
C.6 Pernyataan	Wajib Pajak :	n bahwa bukti Pemotongan/Pemungu nik.	tan Unifikasi telah say	⁄a isi dengan	benar dan telah saya		
		Sesuai dengan ketentuan ya elektronik sehingga tidak dip	ang berlaku, Direktorat Jenderal Pajal perlukan tanda tangan.	k mengatur bahwa dol	kumen ini tel	ah ditandatangani secara	

MRPD9X15